

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERIKANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

<http://diskan.luwutimurkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024 Dinas Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Januari 2023



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip/19651231 198603 1 134

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 27 Januari 2023

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekertaris Dinas
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Anggota :

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3. Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Fungsional Analis Akuakultur
6. Fungsional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap
7. Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
8. Fungsional Pengelolaan Dampak Lingkungan
9. Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
10. Kepala UPTD BBI



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Np. 19651231 198603 1 134

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 27 Januari 2023

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. Penanggungjawab

- Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan.
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam menyusun Renja Dinas Perikanan.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. Ketua

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Perikanan.
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam menyusun Renja Dinas Perikanan.
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Renja Dinas Perikanan.

3. Anggota

- Mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu
- Melaksanakan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan
- Melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelegaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan.
- Melakukan telahaan terhadap rancangan awal RKPD.
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan.
- Merumuskan kegiatan prioritas.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024, perlu disusun rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran tahun 2024.

b. bahwa Rencana Kerja Perubahan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Maret 2023



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip : 19651231 198603 1 134

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga “Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun ke 3 (tiga) dari RPJMD 2021 – 2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada sektor Perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam menyukseskan pembangunan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Makassar, Maret 2023

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pdt. Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
4.2. Program dan Kegiatan	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	46
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan sampai dengan Tahun Berjalan.....	8
Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja Eselon II.....	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan	25
Tabel 2.4 Isu Strategis yang Melingkupi Pelaksanaan Pelayanan di Sektor Perikanan	27
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

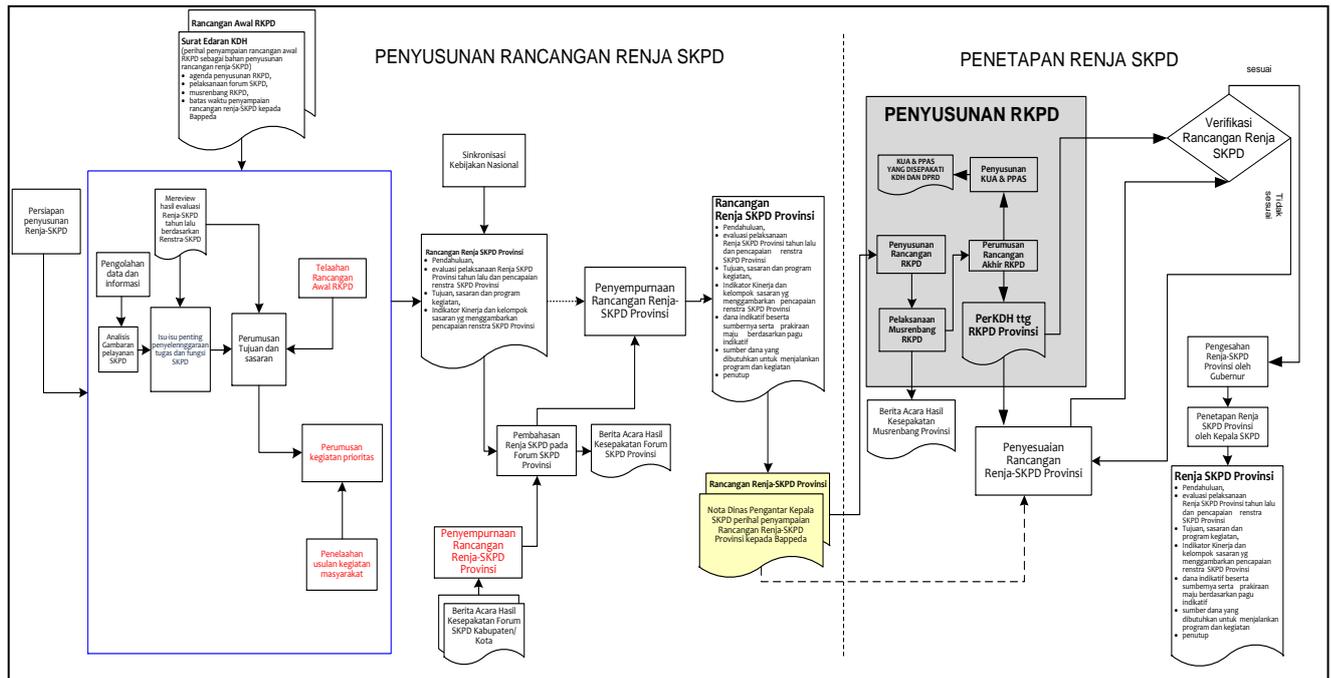
Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacu pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Prioritas pembangunan Dinas Perikanan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPDP tahun 2024. Penyusunan Renja OPD harus mempertimbangan RKP Nasional, RKPDP Propinsi dan Rancangan Awal RKPDP Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah:



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;.
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah :

- ☞ Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan
- ☞ Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD, KUA PPAS RKA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024
- ☞ Menyiapkan Kerangka valuasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 Tahun.
- ☞ Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- ☞ Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- ☞ Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
- ☞ Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan.
- ☞ Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- ☞ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Dinas Perikanan Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. 2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2022, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauhmana organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi Renja Dinas Perikanan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Perikanan. Pada Tahun 2022 Dinas Perikanan melaksanakan 5 Program, Kegiatan 18 dan 45 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.619.608.628,27,- atau sebesar 99,19 % dari pagu anggaran sebesar Rp.17.763.119.236,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.15.269.596.636 terealisasi Rp.15.132.438.231,18 atau 99,10 %, dan Belanja Modal Rp. 2.493.522.600 terealisasi Rp.2.479.646.397,09 atau 99,44 %. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1. (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2026 Akhir Periode RENSTRA SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
25	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
			04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

			07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	50 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
25	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100 Persen		100 Persen	97,54 Persen	97,54 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	31 Orang		26 Orang	26 Orang	100 %
			07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	90 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100 %
25	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen)	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
25	01	2.04		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD (persen)	100 Persen		100 Persen	23,60 Persen	23,60 %
			07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
25	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	90,48 Persen	90,48 %
			03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
			09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang)	35 Orang		2 Orang	2 Orang	100 %

			10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	35 Orang		2 Orang	1 Orang	50 %
			11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	35 Orang		5 Orang	4 Orang	80 %
25	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100 Persen		100 Persen	80,53 Persen	80,53 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			4 Unit	4 Unit	100 %
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	105 Jenis		18 Jenis	18 Jenis	100 %
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	20 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100 %
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	240 Eksamplar		48 Eksamplar	48 Eksamplar	100 %
			08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	800 Orang		160 Orang	160 Orang	100 %
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1.000 Kali		210 Kali	211 Kali	100 %
25	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	20 Unit		2 Unit	2 Unit	100 %

25	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	100 Persen		100 Persen	125,68 Persen	125,68 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	10.000 Surat		2.000 Surat	2.532 Surat	126,6 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	10 Rekening		10 Rekening	10 Rekening	100 %
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100 %
25	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik(persen)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23 Unit		23 Unit	23 Unit	100 %
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	25 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %
			09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100 %
25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	10.369 Ton		10,165 Ton	10,267.5 Ton	101,01 %
25	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap (unit)	10 Unit		2 Unit	2 Unit	100 %

			03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan	75 Kelompok		32 Kelompok	32 Kelompok	100 %
25	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok)	100 Orang		20 Kelompok	10 Kelompok	50 %
			02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	60 Kelompok		12 Kelompok	12 Kelompok	100 %
			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil)	400 Persil		80 Persil	0 Persil	0 %
25	03	2.03		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	100 Persen		57 Persen	71,42 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %
25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	316.365 Ton		315,565 Ton	318,944.59 Ton	101,07 %
25	04	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	100 Persen		90 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	100 Kelompok		30 Kelompok	30 Kelompok	100 %

			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil)	300 Persil		50 Persil	50 Persil	100 %
			04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	150 Kelompok		30 Kelompok	30 Kelompok	100 %
25	04	2.04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen)	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab	10 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %
					Jumlah jembatan tambak yang disediakan	15 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %
					Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan	20 Km		12 Km	11.03 Km	94,16 %
			03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok)	100 Kelompok		49 Kelompok	49 Kelompok	100 %
			04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)	150 Orang		30 Orang	30 Orang	100 %
			05	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)	490.000 Ekor		80.000 Ekor	100.000 Ekor	125 %

25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN-PERUNDANGAN YANG BERLAKU (PERSEN)	100 Persen		94 Persen	94 Persen	100 %
		2.01		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)	120 Kali		24 Kali	24 Kali	100 %
25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN (TON)	370 Ton		322 Ton	710.57 Ton	220 %
		2.01		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 %
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		2.02		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)	83 Persen		83 Persen	63,16 Persen	76,09 %
			01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)	25 kali		2 kali	2 kali	100 %
		2.03		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)	100 Persen		55 Persen	100 Persen	181,81 %

			02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	25 kelompok		4 kelompok	4 kelompok	100 %
--	--	--	----	--	--	-------------	--	------------	------------	-------

Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

$x \geq 85$: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
$x < 55$: Kurang berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam Tabel .

Tabel 2.2. Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)	655.256	661.796,08	100,99	Sangat Berhasil
		Produksi Perikanan (Ton)	325.730	329.212,09	101,06	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip (Angka)	71	71.39	100,54	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Program (Persen)	90	99,43	110,47	Sangat Berhasil

Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang ditetapkan rata-rata capaian di atas 100% sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan Produktivitas Sektor Perikanan

Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Indikator Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha, yang sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik, namun Data untuk tahun 2022 belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2021.

1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2022, melebihi dari target yang akan dicapai sebesar 100,99 %, perbandingan antara target dan realisasi Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berikut tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja dibawah ini.

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha	655.256	661.796,08	100,99 %
Persentase Capaian Rata - rata			100,99 %

Berdasarkan tabel diatas pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya peningkatan Jumlah produksi perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga penghasilan masyarakat meningkat.

1.2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2019-2022:

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha (Rupiah)	603.105,88	636.794,66	635.189,74	661.796,08

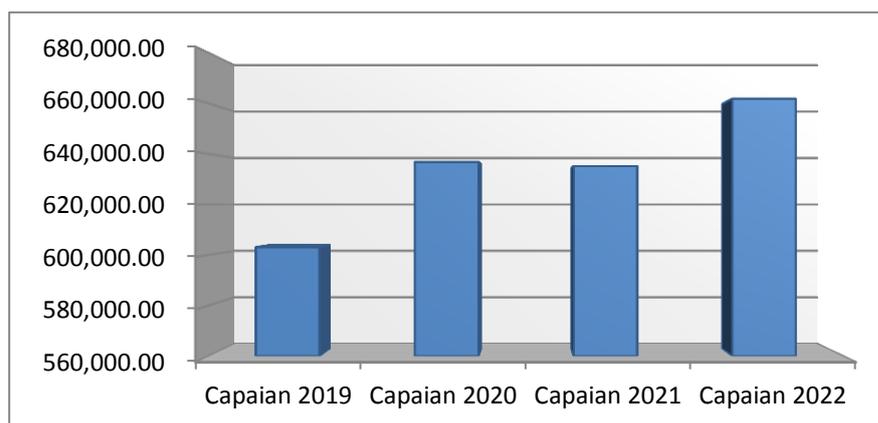


Diagram Realisasi Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,02, salah satu pemicu sehingga Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat pembantu penangkapan ikan yang salurkan kemasyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta adalah perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat akan menjanjikannya baik itu budidaya air payau dan air tawar.

1.3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)	661.796,08	665.289	675.323

Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Produksi Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Jumlah Produksi Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2022, melebihi dari target produksi yang akan dicapai sebesar 101,06 %, perbandingan antara target produksi dan realisasi produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berikut tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja dibawah ini.

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	325.730	329.212,09	101,06 %
Persentase Capaian Rata - rata			101,06 %

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi perikanan melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi dari segi budidaya perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis cottoni sehingga terjadi peningkatan produksi.

2.2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2019-2022:

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Produksi Perikanan (Ton)	320.368	325.355	325.622	329.212,09

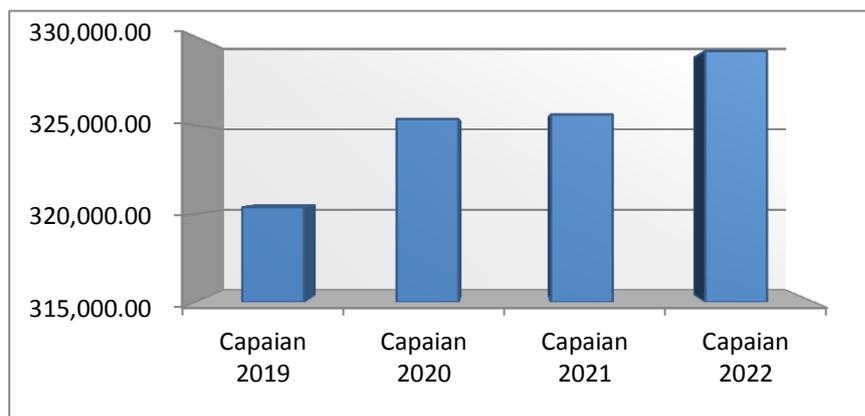


Diagram Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (ton)

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 Jumlah produksi perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat pembantu penangkapan ikan yang salurkan kemasyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta adalah perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat akan menjanjikannya baik itu budidaya air payau dan air tawar.

2.3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Renstra Produksi Perikanan (Ton) 2023 - 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Produksi Perikanan (Ton)	329.212,09	325.926	326.122

2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Provinsi	Standar Nasional
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	329.212,09	1,316,708	6,660,000

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 25.00 % terhadap target pencapaian produksi perikanan provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk pencapaian target nasional Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 4.94 %.

Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 3 : Nilai LAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indikator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus $N - 1$ dimana di masukkan adalah capaian Tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai **71**.

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Lakip	71	71,39	100%
Persentase Capaian Rata - rata			

3.2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Nilai Lakip	44,14	65,69	60,37	65,75

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan, ini dipicu oleh adanya kerjasama antar stockholder didalam lingkup Dinas Perikanan yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka..

3.3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra

Pencapaian kinerja tahun 2021 dengan target renstra pada tahun tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan target renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022
Nilai Lakip	65,75	71,39	BB

Indikator Kinerja 4 : Rata-Rata Capaian Program

4.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Indikator Kinerja Rata-rata Capaian Program Dinas Perikanan Tahun 2022 pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

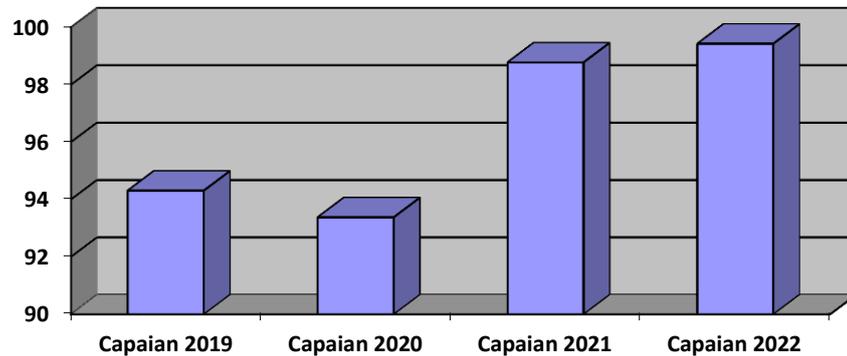
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rata-Rata Capaian Program	90 Persen	99,43 Persen	110,47 Persen

Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Capaian Program Dinas Perikanan Tahun 2022 melampaui dari target yang ditetapkan.

4.2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Rata-Rata Capaian Program	94,31 Persen	93,38 Persen	98,78 Persen	99,43 Persen



Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Rata-rata capaian program menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 capaian kinerja Rata-rata capaian program diatas 90 Persen, Hal ini menandakan rata – rata kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

4.3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra

Pencapaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra pada tahun tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Rata-Rata Capaian Program	99,43 Persen	100 Persen	100 Persen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar global. Selain itu, pelaksanaan urusan Perikanan dan implementasi dari Visi Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 yaitu **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”**.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendagri 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat pada **tabel** sebagai berikut :

Tabel. 2.3. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Luwu Timur

No.	INDIKATOR	SPM /Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2			3	4	5	6		7	8			9	10	11
1.	Produksi perikanan		Jumlah Produksi Ikan (Ton) dibagi Target Daerah (Ton) x100%	100	100	100	100								
2	Konsumsi ikan		Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) di bagi Target Daerah (Kg) x100%	100	100	100	100								
3	Cakupan bina kelompok nelayan		Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n dibagi Jumlah kelompok nelayan x100%	12.00	13.00	14.00	15.00								
4	Produksi perikanan kelompok		Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok	42.00	42.00	42.00	42.00								

	nelayan		nelayan dibagi Jumlah produksi ikan di daerah x100%												
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		Jumlah tangkapan ikan dibagi 80% dari tangkapan maksimum lestari x 100%	1.26	1.27	1.28	1.29								
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		Kawasan lindung perairan Total luas perairan teritorial	0.23	0.23	0.23	0.23								
7	Nilai tukar nelayan		Indeks yang diterima nelayan Indeks yang dibayar nelayan x 100	105,15	106,01	106,87	107.73								

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) serta tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah – langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Rancangan RPJMD 2021 – 2026 yang merupakan perwujudan dokumen resmi dari rencana kerja pencapaian visi misi Bupati terpilih tahun 2021 – 2025 menjadi bahan pertimbangan prioritas dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan antara tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan Stok Ikan	Kesenjangan Gender / akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha Perikanan	
2	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut)	
3	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang.	Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang.	
4	Masih maraknya IUU Fishing di wil pesisir & perairan pedalaman	Pemahaman masyarakat tentang penanganan Mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	

5	Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah.	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
6	Degradasi dan kerusakan lingkungan		Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan periode lima tahun sebelumnya dan telaahan terhadap visi misi Bupati Terpilih serta kaitannya dengan rencana pembangunan nasional (Renstra K/L), dan provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan SDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan infastruktur/sarana prasarana dari perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan perikanan; dan
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani pembudidaya dan nelayan perikanan.
4. Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah

Sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan;
- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam, adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan;
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi; dan
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*);
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan profesional;
- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*;
- d. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;
- f. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global; dan
- g. Tersedianya jaringan internet online di semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat;
- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- d. Kurangnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- e. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan-kegiatan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024, tidak terlepas dari Rancangan RPJMD Tahun 2021 - 2026, yang memuat program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi misi Bupati.

Pertimbangan dan analisis kebutuhan berdasarkan hasil musrenbang dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perikanan maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan, disajikan sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas Dinas Perikanan yang telah ditetapkan melalui Rancangan RPJMD 2021 – 2026 dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- ❑ Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim perencanaan Daerah (Bapelitbanda) yang kemudian oleh Dinas Perikanan diperjelas dalam bentuk **program prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas**;
- ❑ Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing Bidang di Dinas Perikanan akan menjadi bahan diskusi dalam Musrenbang Kecamatan untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
- ❑ Hasil Musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun berikutnya;
- ❑ Pokok-pokok Pikiran DPRD juga menjadi bahan pertimbangan penyusunan RENJA Tahun 2024;
- ❑ Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun proses sosialisasi perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan MUSRENBANG dan berlangsung hanya sehari, sehingga waktu untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa/kecamatan dan kabupaten/DPRD sebagai pemegang kendali kebijakan eksekutif/legislatif tidak bisa berjalan secara optimal. Mekanisme perencanaan melalui MUSRENBANG secara berjejang yang bahkan

dilengkapi dengan reses yang dilakukan oleh para legislator masih belum mampu mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Kendala lain pengumpulan informasi pada musrenbang tingkat kabupaten yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

Telaahan terhadap usulan program yang diajukan oleh pemangku kepentingan melalui kegiatan Musrenbang 2023 dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dapat dievaluasi bahwa beberapa kegiatan yang diusulkan pada umumnya bersifat permintaan bantuan langsung berupa sarana produksi perikanan budidaya maupun sarana produksi perikanan tangkap. Sesuai ketentuan Permendagri 32 Tahun 2010 yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, Evaluasi Hibah dan bantuan sosial.

Sebagian besar usulan MUSRENBANG Tahun 2022 yang menjadi bahan perencanaan Tahun 2021 merupakan usulan dalam bentuk bantuan hibah baik berupa sarana produksi maupun bantuan hibah pembangunan sarana fisik. Namun yang menjadi permasalahan permintaan bantuan hibah tersebut tidak dibarengi dengan usulan dalam bentuk proposal sehingga mekanisme administrasi perencanaan tidak optimal.

Tabel 2.5. (T- C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
1.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lakawali Desa Lampenai, Desa Tadulako Desa Tampinna	Jumlah jalan produksi Tambak yang dibangun (Km) Jumlah Jembatan tambak yang disediakan (unit)	3 Paket 1 Unit	Memudahkan masyarakat petani tambak dalam mobilisasi hasil budidaya Memudahkan masyarakat petani tambak dalam mobilisasi hasil budidaya
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lauwo, Desa Balo-Balo, Desa Mabonta, Desa Bawalipu, Desa Lampenai	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (kelompok)	20 Paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat Petani tambak untuk meningkatkan hasil produksi budidaya
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Tampinna, Desa Tabaroge	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehap	2 Unit	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat untuk memudahkan dalam mobilisasi dan pemasaran hasil tangkapan
2.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Lampenai, Desa Rinjani, Desa Lakawali Desa Tokalimbo	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (kelompok)	7 paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat nelayan untuk memperbaiki alat tangkap sehingga meningkatkan hasil tangkapan

III.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1.	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Desa Wewagriu, Desa	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Kelompok)	4 Paket	Kegiatan ini sangat di butuhkan masyarakat pelaku usaha perikanan untuk memperbarui alat pengolahan hasil perikanan sehingga meningkatkan hasil produksi olahan hasil perikanan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan secara teknis mengacu pada **arah** kebijakan pembangunan Nasional dan arah Kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sektor Kelautan, Perikanan

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat empat major project terkait dengan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

- ☞ Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- ☞ Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- ☞ Integrasi Pelabuhan Perikanan dan
- ☞ Pasar Ikan (Fish Market) Bertaraf Internasional

2. Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi

Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

- ☞ Peningkatan Produksi Perikanan
- ☞ Peningkatan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- ☞ Peningkatan Ekspor Hasil perikanan.
- ☞ Nilai tambah produk olahan.
- ☞ Pendapatan perkapita nelayan dan pembudidaya.
- ☞ Jumlah Tenaga Kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pelaksanaan perencanaan kerja Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Ketiga dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Prioritas pembangunan difokuskan kepada pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra OPD.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Adapun tujuan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang telah diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang diharapkan dalam jangka pencapaian tujuan Renja Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kebijakan Pembangunan kelautan dan perikanan selama periode 2021 – 2026, maka ditetapkan program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang terkait erat dalam upaya pencapaian pembangunan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur. Program dan Kegiatan Tahun 2023 akan dilaksanakan dalam 5 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan terdiri dari :

1.1. Bidang Perikanan Tangkap

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi terutama dari hasil tangkapan nelayan. Indikator Program ini ialah Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. Untuk mencapai target program tersebut, maka dilakukan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

- 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - 3.1 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Sasaran kegiatan adalah pemberdayaan kelompok nelayan
 - 2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah nelayan purse seine yang dilatih.
 - 2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan sasaran kegiatan adalah Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan sasaran kegiatan adalah peningkatan usaha nelayan kecil
 3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sasaran kegiatan adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan
 - 3.1. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sasaran sub kegiatan adalah ketersediaan.

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- A. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat

Diusahakan dalam Kabupaten dengan sasaran kegiatan adalah menurunnya tingkat pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan.

- 1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. dengan sasaran sub kegiatan adalah menurunnya tingkat pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan.

B. Bidang Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil Budidaya melalui Pengembangan Bibit Ikan Unggul di Balai Benih maupun Kelompok, pendampingan terhadap Kelompok Penerima Bantuan baik dari APBN Pusat, Propinsi maupun dari Pemda. Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil sasaran kegiatan adalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil sasaran Sub kegiatan adalah peningkatan kapasitas pembudidaya ikan.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, sasaran Sub kegiatan adalah peningkatan usaha pembudidaya ikan.
 - 3.1. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sasaran Sub kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi pembudidaya ikan
2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan sasaran kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran

kegiatan adalah tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan.

- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan
- 2.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan.
- 2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kegiatan adalah menurunnya jumlah penyakit ikan.
- 2.5. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya hasil pembudidaya ikan.

C. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan melalui pembinaan kelompok pengolahan ikan, pengelolaan pabrik rumput laut, pengelolaan pabrik es, pengelolaan gudang rumput laut dan peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ikan lainnya. Kegiatan dan Sub Kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan sasaran kegiatan adalah Terdaftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Sub kegiatan adalah Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran Sub kegiatan adalah peningkatan pengetahuan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan
 - 3.1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran Sub kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana.

D. Kesekretariatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan sasaran program adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator program Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun.

- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu.
- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah dokumen RKA-SKPD perubahan yang disusun tepat waktu
- 1.4. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.
 - 2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikator adalah Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan.
 - 3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas

kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu.

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indikatornya adalah Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah.
 - 4.1. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah Persentase kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan.
 - 5.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan.
 - 5.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - 5.4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.

- 5.5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.
 - 6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - 6.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya.
 - 6.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang diadakan.
 - 7.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan.
 - 7.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah mebel yang diadakan.
 - 7.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan.
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan.
 - 8.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan.

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
 - 9.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
 - 9.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah mebel yang di pelihara.
 - 9.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
 - 9.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan indicator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.

Untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dapat dilihat pada lampiran:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan 5 Program, 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 14.031.942.200,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada lampiran:

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2024, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 5 Program yang akan diakselerasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Mali, Maret 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198603 1 134

L
A
M
P
I
R
A
N

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Luwu Timur
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
	Dinas Perikanan																			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														14.031.942.200,00		13.462.000.000,00		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														4.382.510.000,00		4.550.000.000,00	
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														4.134.604.630,00		4.270.000.000,00
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan															
					Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	4 Dokumen	100 Persen	63.104.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	70.000.000,00				
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap															
					Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	2 Unit	100 Persen	199.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	200.000.000,00				
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap															
					Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	25 Unit	100 Persen	3.871.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	25 Unit	4.000.000.000,00				
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota												187.905.370,00		200.000.000,00	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil															
					Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	20 Orang	100 Persen	42.065.370,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	50.000.000,00				
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	12 Kelompok	100 Persen	145.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	150.000.000,00		
3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					60.000.000,00			80.000.000,00				
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											
					Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267 Ton	1 Layanan	100 Persen 71 Persen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	80.000.000,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.684.092.521,00			2.560.000.000,00					
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					389.950.640,00			410.000.000,00				
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil											
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	10 Kelompok	71 Persen 70 Persen	19.857.695,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	20.000.000,00
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha											
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	10 Kelompok	71 Persen 70 Persen	38.990.445,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	40.000.000,00
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	30 Kelompok	71 Persen 70 Persen	331.102.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	350.000.000,00	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							3.294.141.881,00			2.150.000.000,00			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	4 Dokumen	100 Persen	63.373.215,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	70.000.000,00	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	10 Unit	100 Persen	1.265.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	1.500.000.000,00	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	27 Unit	100 Persen	1.607.599.991,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27 Unit	200.000.000,00	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
					Produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	4 Dokumen	100 Persen	73.504.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	80.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat												
					Produksi perikanan budidaya	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,710 Ton	1000 Ha	100 Persen	284.163.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1000 Ha	300.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						78.407.500,00			80.000.000,00			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						78.407.500,00			80.000.000,00			
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota												
					Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Dokumen	100 Persen	78.407.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	80.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.499.044.480,00			1.700.000.000,00			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						264.879.480,00			300.000.000,00			
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					Produksi hasil pengolahan ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	4 Dokumen	100 Persen	264.879.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	300.000.000,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						137.295.000,00			200.000.000,00			
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Produksi hasil pengolahan ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	10 Unit Usaha	83 Persen	137.295.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	200.000.000,00		
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.096.870.000,00			1.200.000.000,00				
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Produksi hasil pengolahan ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335 Ton	10 Pelaku Usaha	64 Persen	1.096.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	1.200.000.000,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.387.887.699,00		4.572.000.000,00			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95.179.500,00		103.000.000,00			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	2 Dokumen	100 Persen	38.395.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	2 Dokumen	100 Persen	4.728.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000,00
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	2 Dokumen	100 Persen	5.918.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.000.000,00
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	10 Laporan	100 Persen	46.138.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	50.000.000,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.128.207.299,00		3.135.000.000,00	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	26 Orang/bulan	100 Persen	3.032.153.299,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.035.000.000,00
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	18 Laporan	100 Persen	96.054.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	100.000.000,00
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.858.000,00		0,00	
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	40.858.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0,00
3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						14.849.000,00		15.000.000,00	
3	25	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Dokumen	100 Persen	14.849.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	15.000.000,00		
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						122.122.000,00		90.000.000,00			
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Dokumen	100 Persen	37.192.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	40.000.000,00
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	8 Orang	100 Persen	84.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50.000.000,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						529.711.900,00		615.000.000,00			
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Paket	100 Persen	6.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Paket	100 Persen	51.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.000.000,00
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	20 Paket	100 Persen	10.685.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.000.000,00
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Paket	100 Persen	10.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	48 Dokumen	100 Persen	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	8.000.000,00
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Laporan	100 Persen	13.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Laporan	100 Persen	429.622.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000.000,00			90.000.000,00
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	0 Unit	100 Persen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	10.000.000,00
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Unit	100 Persen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250.700.000,00			294.000.000,00
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Laporan	100 Persen	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Laporan	100 Persen	84.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	12 Laporan	100 Persen	162.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146.260.000,00				230.000.000,00			
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	23 Unit	100 Persen	94.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	100.000.000,00	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	5 Unit	100 Persen	23.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000,00	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	4 Unit	100 Persen	28.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.000.000,00	
TOTAL											14.031.942.200,00				13.462.000.000,00			